



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 11 Januari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI
UNIT KERJA : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

I. DATA PRIBADI

1. Nama : EKO SUBAGYO
2. Jabatan : KEPALA DINAS
3. NHK : 98051

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 450.000.000

1. Tanah Seluas 198 m2 di WONOGIRI, HASIL SENDIRI Rp. 450.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 5.850.000

1. MOTOR, HONDA GL SEPEDA MOTOR Tahun 1997, HIBAH DENGAN AKTA Rp. 1.800.000
2. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 1995, HIBAH DENGAN AKTA Rp. 1.350.000
3. MOBIL, HONDA ACCORD SEDAN Tahun 1981, HASIL SENDIRI Rp. 2.700.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 62.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 92.085.920

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 609.935.920

III. HUTANG Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 609.935.920

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 10 Januari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI
UNIT KERJA : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

I. DATA PRIBADI

1. Nama : LAKSO HARYOTO
2. Jabatan : SEKRETARIS
3. NHK : 749163

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 500.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 714 m2/80 m2 di WONOGIRI, WARISAN Rp. 500.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 13.050.000

1. MOTOR, SUZUKI BEBEK Tahun 1971, HASIL SENDIRI Rp. 4.500.000
2. MOTOR, DAYANG BEBEK Tahun 2005, HASIL SENDIRI Rp. 450.000
3. MOTOR, HONDA BEBEK Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 8.100.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 1.350.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 10.420

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 514.410.420

III. HUTANG Rp. 67.113.297

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 447.297.123

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 10 Januari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI
UNIT KERJA : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

I. DATA PRIBADI

1. Nama : YUNANTO
2. Jabatan : KEPALA SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
3. NHK : 715345

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 160.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 814 m²/300 m² di KLATEN, WARISAN Rp. 110.000.000
2. Tanah Seluas 255 m² di KLATEN, HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 108.500.000

1. MOTOR, YAMAHA BEBEK Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 6.000.000
2. MOTOR, HONDA BEBEK Tahun 2004, HASIL SENDIRI Rp. 2.500.000
3. MOBIL, TOYOTA RUSH Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 1.500.000**D. SURAT BERHARGA** Rp. ---**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 2.130.417**F. HARTA LAINNYA** Rp. ---**Sub Total** Rp. 272.130.417**III. HUTANG** Rp. 10.000.000**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 262.130.417

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.

**PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA****(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 29 Desember 2022/Khusus - Awal Menjabat)**

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI
UNIT KERJA : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ALFIANI YOGATURIDA ISNAINI
2. Jabatan : KEPALA SUBBAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN
3. NHK : 877175

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 175.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 80 m²/68 m² di KAB / KOTA WONOGIRI, HASIL SENDIRI Rp. 175.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 103.000.000

1. MOBIL, HONDA BRIO DD2 1.3 S M/T Tahun 2013, HADIAH Rp. 100.000.000
2. MOTOR, YAMAHA MIO AT/AL115 S 28 D CW Tahun 2011, HADIAH Rp. 3.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. ---

D. SURAT BERHARGA Rp. ---

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 133.724.296

F. HARTA LAINNYA Rp. ---

Sub Total Rp. 411.724.296

III. HUTANG Rp. 329.636.608

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 82.087.688

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.



3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.

